

## DAFTAR PUSTAKA

### Litaratur

- Barda Nawawi Arief, *“perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada-Jakarta 1994.
- Bintan R. Saragih,, *“Politik Hukum”*, Bandung 2015;
- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)”*, Kencana-Jakarta, 2017.
- Gatot Supramono, Gramedia Publising-Bekasi, 2014.
- Handiyanto, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok. Jabar. 2022.
- Jimmy Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Kompress-Jakarta 2021.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2001.
- Komariah Emong Sapardjaja, *“Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni-Bandung, 2013.
- Muhamad Djafar Saidi, *Buku Keempat Hukum Keuangan Negara*, PT RajaGrafindo Persada-Jakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi, *“Teori-teori dan kebijakan pidana”*, Alumni-Bandung, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan Ke-11, Jakarta Kencana, 2011.
- Romli Atmasamita, *Pemberantasan Tindak Pidana Korups (aspek nasional &internasional)”*, CV. Mandiri Maju 2021;

R. Soesilo, “*Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*”, (POLITEA-BOGOR, tanpa tahun penerbit, Dicitak p.t Karya Nusantara Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Syamsul Fatoni, “*Pembaharuan Sistem Pemidanaan*”, Setara Pers-Jakarta 2015.

Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Rajawali Pers Divisi Perguruan Tinggi Pt RajaGrafindo Persada-Jakarta, 2012.

Theodorus M. Tuanakota, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Edisi 2*, Salemba Empat-Jakarta, 2018.

Tim Garda Tipikor, *Kejahatan Korupsi*, Rangkang Education-Yogjakarta) 2016.

#### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, LN No.157 Tahun 1958.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UUNo. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 387. Indonesia.

Undang-Undang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286. Indonesia. Undang-Undang Perbendaharaan Negara, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355.21Indonesia.

Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2004, LN No. 66 Tahun 2004, TLN No. 4400. Indonesia.

Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, UUNo. 15 Tahun 2006, LN No. 85 Tahun 2006, TLN No. 4654. Pengelolaan Keuangan Daerah, 6 maret 2019, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta;

Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Ganti Kerugian negara Terhadap Bendahara.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Pegawai bukan Bendahara dan Pejabat lainnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penetapan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjatuhan Pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU-PTPK.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.505/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Keluar Negeri.

Perkapolri Nomor 4 Tahun 2010 mengatur tatacara pelaksanaan pidana mati.

Perpres 2 Tahun 1964, pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak.

### **Putusan**

Putusan MA RI No 257 K/Pid/1983 tanggal 28 Desember 1983.

Putusan Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966.

Putusan MA No 71/K/1970 tanggal 27 Mei 1972 dan Putusan MA No 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977,

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd. yang sudah *In krah* (berkekuatan hukum tetap).

### **Makalah**

BPKP12 “Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional tahun 1999.

Budiman Slamet, Metode Perhitungan Kerugian negara Dalam Audit Investigatif Modul Ajar 2021, BPK RI, dalam Pendidikan Latihan Hakim Tindak Pidana Korupsi tahun 2022;

Budiono (2002), Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Azas Desentralisasi Fiskal, Makalah, Rakor Pemandangan Aparatus Negara Tingkat Nasional Tahun 2022, 11 Pebruari 2002 Jakarta;

### **Internet**

Aplikasi KBBI Androit Versi 1.0.0 (100) 2016-2024 Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

<https://Jurnal.fajum.Untad.id>. diakses tanggal 21 Oktober 2020. Moh. Yusril, Syahladin, Kamal dengan judul Implementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggal).

[https://www.google.com/search?q=definisi+yurisprudence&rlz=1C1CHBD\\_enID841ID841&oq=definisi+yurisprudence&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAE EUYOTIMCAEQAB](https://www.google.com/search?q=definisi+yurisprudence&rlz=1C1CHBD_enID841ID841&oq=definisi+yurisprudence&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAE EUYOTIMCAEQAB).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Metode deduksi.](https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi)

[https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi.](https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi)

